

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perwakilan dalam teori politik modern merupakan mekanisme yang menghubungkan antara pemegang kekuasaan dengan Masyarakat. Dalam hal ini seorang aktor politik mewakili Masyarakat untuk bertindak dilembaga perwakilan dengan sesuai apa yang menjadi keinginan public. Dalam mandat representative perwakilan merupakan seorang wakil tidak mengenal yang memberikan mandat untuk mewakili suaranya, karena dalam penunjukan dan pemilihan oleh Lembaga pemilihan. Dalam hal ini mekanismenya mereka yang diwakili memandatkan suaranya pada Lembaga perwakilannya. Lembaga perwakilan kemudian menunjuk anggotanya untuk mewakili konstituen mereka, maka dengan ini wakil tidak ada hubungan dengan pemilih. (Leo Agustino, 2020)

Kajian mengenai ilmu politik kontemporer tidak lagi hanya sekadar membahas mekanisme perolehan kekuasaan atau struktur formal negara, melainkan telah bergeser ke arah pemahaman yang lebih substantif mengenai bagaimana kebijakan publik mencerminkan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat. Dalam konteks Indonesia, salah satu isu sentral yang terus mengemuka adalah representasi politisi perempuan. Secara teoretis, keterlibatan perempuan dalam politik bukan sekadar pemenuhan aspek keadilan formal, melainkan prasyarat bagi tercapainya kualitas demokrasi yang inklusif. Leo Agustino, melalui karyanya dalam bidang ilmu politik, memberikan landasan fundamental untuk memahami bagaimana politik sebagai ilmu menyasar pada pengelolaan kekuasaan, sistem perwakilan, dan perumusan kebijakan yang tidak bisa dilepaskan dari variabel gender.

Keterwakilan perempuan dalam kancah politik formal bukan sekadar isu pemenuhan kuota numerik, melainkan sebuah perjuangan eksistensial untuk memastikan bahwa perspektif gender terintegrasi dalam setiap sendi kebijakan publik (Leo Agustino, 2020). Di Indonesia, perjalanan ini telah mengalami evolusi yang signifikan, terutama pasca-reformasi yang membuka keran

demokrasi seluas-luasnya bagi seluruh elemen bangsa. Kota Depok, sebagai wilayah Urban yang memiliki kompleksitas sosial dan politik yang tinggi, menjadi lokus penelitian yang sangat relevan untuk membedah bagaimana kebijakan afirmatif diimplementasikan di tingkat lokal. Representasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok untuk periode 2024-2025 tidak hanya mencerminkan dinamika elektoral, tetapi juga menjadi barometer bagi efektivitas partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen dan kaderisasi yang responsif gender. Namun, seiring berjalannya waktu, focus kajian harus beralih dari sekedar jumlah (*Quantitative Representasion*) ke dampak nyata kehadiran Perempuan terhadap kualitas legislasi dan kebijakan public (*Subtantine Representasion*). Representasi Subtantif merujuk sejauh mana anggota dewan Perempuan secara efektif memperjuangkan kepentingan, kebutuhan, dan agenda gender bagi konsituen Perempuan dari berbagai lapisan sosial. (STELLA VERDIANA PURNAMA, n.d.)

Representasi politisi perempuan di DPRD Kota Depok, dilihat dari kehadiran politisi Perempuan partai Golongan Karya tidak sekedar angka melainkan juga diterjemahkan kedalam Tindakan politik dan kebijakan, Representasi substantif terjadi ketika politisi ini bertindak sebagai agen bagi kepentingan gender (acting), bukan sekedar sebagai symbol. Politisi Perempuan Golkar kota Depok berfokus kepada isu yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat di kota Depok, dengan mementingkan ketahanan keluarga, Kesehatan ibu dan anak.

Representasi Subtantif diukur sejauh mana politisi Perempuan memperjuangkan anggaran yang responsive terhadap gender, politisi Perempuan Golkar ikut aktif dalam rapat-rapat komisi terkait alokasi dana untuk pemberdayaan ekonomi Perempuan melalui UMKM local, selain itu mereka juga ikut aktif dalam isu non-gender, seperti isu keamanan infrastruktur yang berdampak terhadap keselamatan anak-anak dan warga sekitar. Dengan hal ini kepentingan Perempuan, dapat diartikan sebagai kepentingan ruang publik yang aman.

Analisis Representasi politisi perempuan Golkar di Depok periode 2024-2025 sudah melampaui angka-angka statistik (deskriptif) untuk melihat sejauh mana mereka mampu menjadi agen perubahan yang substantif di parlemen. Hal ini melibatkan evaluasi terhadap partisipasi mereka dalam rapat-rapat komisi, pengusulan Raperda, dan efektivitas mereka dalam menyalurkan aspirasi konstituen selama masa reses.

Fraksi Partai Golkar di DPRD Kota Depok periode 2024-2029 terdiri dari tujuh orang, di mana tiga di antaranya adalah perempuan. Komposisi ini menarik karena menunjukkan persentase perempuan sebesar 42,8% di internal fraksi, sebuah angka yang jauh melampaui rata-rata keterwakilan perempuan di DPRD Depok secara keseluruhan (24%). Ketiga politisi perempuan tersebut memiliki latar belakang dan spesialisasi yang beragam, yang memberikan warna tersendiri bagi dinamika fraksi.

Partai Golongan Karya Kota Depok berhasil mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok 3 kursi perempuan dari 7 Kursi yang didapatkan oleh Partai Golkar, Hj. Juannah Sarmili (Dapil Sukmajaya, sebagai wakil Ketua Fraksi) Supriatni S.Ag M.M. (Dapil Pancoranmas, Ketua Komisi D), dan Fanny Fatmawati Putri S.H M.kom (Dapil Cilodong-Tapos). Kondisi Eksisting ini telah melampaui kouta 30% nasional, akan tetapi tantangan patriarki dan beban domestik menjadi hambatan terhadap Representasi Substantif (Pitkin, 1967). Dalam Data Komisi Pemilihan Umum Depok 2024 menunjukan Golkar Partuhi DCS dengan >30% caleg perempuan, hasilkan kontribusi di perda ketahanan Keluarga No. 6/2024 dan program sekolah pra-nikah.

Tabel 1. 1 Komposisi Politisi Perempuan Golkar DPRD Kota Depok 2024-2029

Nama Anggota Legislatif	Status	Jabatan Fraksi	Penempatan Komisi
Hj. Juanah Sarmili	Petahana	Wakil Ketua Fraksi	-
Supriatni, S.Ag., M.M.	Petahana	Anggota Fraksi	Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)
Fanny Fatwati Putri, S.H., M.Kom.	Baru	Anggota Fraksi	Komisi D (Kesejahteraan Rakyat)

Meski telah memenuhi kuota representasi perempuan sebesar 42,8% > rata-rata DPRD Kota Depok (24%), efektivitas substantif terbatas oleh dominasi maskulin. Dengan Supriatni Kawal UHC dan penurunan angka kematian Ibu, akan tetapi partisipasi reses gender masih rendah.

Keberadaan kombinasi antara politisi senior dan pendatang baru di dalam Fraksi Golkar ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan pengalaman (mentorship) yang baik di internal partai. Hal ini sangat penting bagi keberlanjutan representasi perempuan yang berkualitas, di mana politisi muda dapat belajar mengenai strategi negosiasi politik dari seniorinya, sementara politisi senior dapat mengadopsi cara-cara komunikasi yang lebih modern dari kader mudanya.

Dalam lokus penelitian ini, dinamika representasi tersebut tercermin pada profil politisi perempuan Partai Golkar di DPRD Kota Depok periode 2024-2029. Kehadiran figur seperti Hj. Juanah Sarmili sebagai Wakil Ketua Fraksi, serta Supriatni, S.Ag., M.M., dan Fanny Fatwati Putri, SH, M.IKom., menjadi bukti empiris keterlibatan perempuan dalam struktur formal partai. Penempatan Supriatni sebagai Ketua Komisi D yang membidangi isu-isu krusial

seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, memberikan ruang bagi implementasi politik yang lebih responsif terhadap kebutuhan gender. Hal ini sejalan dengan argumentasi dari AH. Birch bahwa politisi perempuan sering kali membawa perspektif yang lebih peka terhadap masalah sosial kemasyarakatan dibandingkan politisi laki-laki yang cenderung berfokus pada ranah "*high politics*". Meskipun demikian, efektivitas peran mereka tetap dibayangi oleh tantangan struktural dalam lembaga legislatif yang masih didominasi oleh pimpinan laki-laki, yang dalam pandangan Agustino merupakan refleksi dari aturan main politik yang maskulin.

Partai politik merupakan organisasi yang memiliki fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agregasi kepentingan publik, kepentingan partai politik semakin meninggi apabila keberadaan dikaitkan dengan kepentingan publik yang harus didengar pemerintah dan parlemen. Partai politik sejatinya ialah jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, yang menjadikan partai politik sebagai pilar dan institusi yang penting, selain lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, pemilihan umum, dan media massa yang independen dalam membangun politik yang berkualitas dan beradab. Kualitas politik ini memiliki makna bahwa partai politik memegang peran dan fungsi untuk mengupayakan dan meredam, bahkan menyelesaikan berbagai permasalahan publik yang muncul. (Kurniawan & Handayani, 2022)

Perbedaan pendapat secara eskalasi menjadi konflik destruktif dan diselesaikan secara dialogis partai politik dapat menunjukkan keberadaannya. Terdapat alasannya bahwa partai politik dibutuhkan dalam konteks pelembagaan dirinya, pertama, partai politik adalah kendaraan utama untuk mewujudkan perwakilan politik. Kedua, partai politik Adalah mekanisme utama dalam menyelenggarakan pemerintahan. Ketiga, partai politik adalah saluran utama dalam memelihara akuntabilitas demokratis. Dari alasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partai politik memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan kelompok kepentingan maupun kelompok penekan. (Kodiyat, 2019)

Secara sederhananya, bahwa partai politik merupakan *representation of ideas* yang harus ada dalam kehidupan demokrasi politik. Partai politik sebagai

organisasi yang memiliki tujuan pada *representation of ideas* secara ideal yaitu untuk mewakiliki kepentingan-kepentingan publik, memberikan jalan dialog bagi pendapat/tuntutan yang saling bersaing, dan menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitim.(Eduard Awang Maha Putra et al., 2024)

Problematika Representasi Politisi perempuan Golkar di DPRD Kota Depok muncul dari tarik-menarik antara kepatuhan administratif dan efektivitas substantif. Secara konseptual, AH. Birch mengidentifikasi bahwa hambatan utama bukan terletak pada kapasitas intelektual, melainkan pada "budaya politik bergaya pria" yang mendominasi aturan main di lembaga legislatif, di mana perempuan cenderung berpartisipasi dengan "setengah hati" karena sistem yang tidak akomodatif. Secara empiris, meskipun politisi seperti Supriatni dan Juanah Sarmili berhasil menduduki posisi strategis, tantangan "ketidakberfikiran" (*thoughtlessness*) akibat beban domestik dan stigma ideologis "ibu vs politisi" tetap menjadi ancaman bagi performa politik mereka di ruang publik. Selain itu, diskoneksi antara rekrutmen partai yang sering kali bersifat "asal comot" demi pemenuhan kuota dengan kurangnya dukungan kampanye yang nyata menciptakan kerentanan posisi perempuan dalam kontestasi politik lokal.

Dalam konteks Depok, representasi perempuan sering kali dipandang sebagai indikator utama dari kematangan sistem demokrasi suatu bangsa. Namun, realitas empiris di Indonesia menunjukkan bahwa perjuangan untuk mencapai keterwakilan yang proporsional masih menghadapi tembok besar yang bersifat struktural maupun kultural. Meskipun regulasi telah mengamanatkan kuota 30 persen keterwakilan perempuan, implementasi di lapangan sering kali hanya menyentuh aspek administratif untuk memenuhi persyaratan verifikasi partai politik, tanpa disertai dengan dukungan nyata dalam kampanye atau peningkatan kapasitas politik. Hal ini menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang bersifat afirmatif (*affirmative action*) dengan hasil nyata (*equality of outcome*) di lembaga legislatif. (Luluatul Hasanah et al., 2025)

Secara lebih mendalam, tujuan fundamental dari representasi politisi perempuan adalah untuk mewujudkan keterwakilan substantif, yakni sejauh

mana ide, pengalaman unik, dan kepentingan kaum perempuan ditransformasikan ke dalam formulasi kebijakan publik. Leo Agustino menekankan bahwa kehadiran perempuan di ruang pengambilan keputusan bertujuan untuk mengimbangi dominasi perspektif maskulin, sehingga produk kebijakan yang dihasilkan baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun penganggaran lebih responsif terhadap isu-isu krusial seperti jaminan sosial, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, representasi substantif tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan hak asasi politik, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mencegah diskriminasi sistemik dan memastikan bahwa implementasi politik benar-benar menghadirkan keadilan bagi seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali.

Dalam perspektif AH. Birch (Leo Agustino, 2020), politik dipahami sebagai usaha untuk menghantarkan keputusan-keputusan secara partisipatif oleh individu-individu yang mendapatkan kekuasaan melalui mekanisme yang sah. Namun, partisipasi ini sering kali bias gender karena struktur politik yang ada saat ini masih sangat didominasi oleh nilai-nilai maskulin. Kehadiran perempuan dalam politik sangat dibutuhkan karena masyarakat memerlukan pandangan yang seimbang antara kebutuhan laki-laki dan perempuan agar kebijakan publik yang dihasilkan tidak diskriminatif. Tanpa representasi yang cukup, fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran cenderung mengabaikan isu-isu krusial seperti kesehatan reproduksi, jaminan sosial keluarga, dan perlindungan anak.

Gambar 1. 1 Garis Kemiskinan 2024 dan 2025 Kota Depok

Wilayah Kota Sendiri	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Depok		
	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
	2024	2024	2024
Kota Depok	843.893,00	62,60	2,34

Wilayah Kota Sendiri	Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Depok		
	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
	2025	2025	2025
Kota Depok	884.633,00	63,45	2,31

Sumber: BPS Kota Depok

Di Kota Depok, salah satu isu sosial yang harus diperjuangkan adalah kemiskinan dan kesejahteraan sosial di masyarakat, data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tercatat mengenai garis kemiskinan kota depok 2024 sebesar 843.893,00 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 62,60%, meningkat pada tahun 2025 garis kemiskinan kota depok sebesar 884,633,00 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 63,45 %. Dan Badan Pusat Statistik tercatat mengenai kehidupan kesejahteraan sosial 2024 sebesar 322.570, pada tahun 2025 sebesar 167.136 dengan beberapa jenis pemerlu kesejahteraan sosial, walaupun menurun mengenai kesejahteraan sosial di kota depok, ada beberapa yang meningkat dari tahun 2024 – 2025 seperti anak terlantar usia 6 – 17 tahun, anak yang memerlukan perlindungan khusus, penyandang disabilitas, pengemis dan penurunan terhadap anak berhadapan dengan hukum dan perempuan rawan sosial.

Tabel 1. 2 Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Kota Depok

Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	2024	2025
Anak terlantar usia 6-17 tahun	1.763	2.346
Anak berhadapan dengan hukum	140	50
Anak yang memerlukan perlindungan khusus	33	1.253
Penyandang disabilitas	2.445	13.468
Pengemis	35	66
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	2.446	259

Sumber : Dinas Sosial Kota Depok

Penelitian yang dilakukan oleh Mulyawan, 2023. Kuota keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi DIY periode 2019-2024 belum mencapai 30%. Dari 55 anggota terpilih, hanya 11 anggota perempuan (sekitar 20%). Banyak calon legislatif (caleg) perempuan yang kehilangan kepercayaan diri karena merasa dipojokkan untuk membuktikan kualitas mereka terlebih dahulu sebelum dicalonkan oleh partai politik. Hal ini menunjukkan perlunya upaya kolektif untuk mewujudkan kesetaraan hak dan keadilan gender.

Penelitian yang dilakukan oleh RAMADHANY, D. 2019, Beberapa partai politik telah memenuhi syarat minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan di DPRD Kabupaten Sleman. Studi ini menyoroti peran modal yang dimiliki caleg perempuan dan bagaimana politik patriarki memengaruhi keterwakilan mereka. Diperlukan strategi, seperti yang dilakukan oleh PDI-P (disebutkan dalam rujukan terkait), untuk meningkatkan jumlah perempuan melalui jaringan internal dan kebijakan afirmatif dalam penyebaran sumber daya kampanye.

Penelitian yang dilakukan oleh Raharjanto, T pada tahun 2024 Adanya peraturan yang mewajibkan 30% keterlibatan perempuan dalam daftar calon legislatif merupakan peluang besar bagi perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu. Peraturan ini meningkatkan pengakuan terhadap keberadaan perempuan dalam politik.

Tingkat Pencalonan Tinggi: Di Minahasa Utara, persentase calon perempuan bahkan mencapai 45% pada Pemilu 2024, melebihi batas minimal 30%, yang memberikan peluang besar bagi perempuan untuk mendapatkan kursi. Di Minahasa Utara, persentase calon perempuan bahkan mencapai 45% pada Pemilu 2024, melebihi batas minimal 30%, yang memberikan peluang besar bagi perempuan untuk mendapatkan kursi. Salah satu tantangan utama adalah pandangan budaya yang masih didominasi patriarki, di mana perempuan masih dianggap lemah atau fokus utamanya adalah di dalam rumah mengurus keluarga, sehingga membatasi aktivitas politik di luar ruangan.

Penelitian ini difokuskan pada parati Golongan Karya (GOLKAR) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok, mencakup periode pasca-pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Depok memiliki total 50 kursi. Golkar berhasil meningkatkan perolehan Kursinya secara signifikan, mengamankan 7 kursi pada periode 2024-2029. Peningkatan kuantitas kursi ini juga menghasilkan peningkatan representasi gender yang substantif, atau hanya menambah jumlah legislator tanpa mengubah arah kebijakan yang berperspektif gender. (FIRMAN JAYA DHARMA BRATA WARUWU, n.d.)

Urgensi dari penelitian ini untuk mengukur efektifitas peran politik perempuan Golkar dalam mempengaruhi agenda kebijakan ditingkat local. Dalam konteks daerah kota Depok yang secara politik sangat kompetitif dan memiliki lingkungan kebijakan yang sensitive terhadap isu gender seperti (Wacana Anti-LGBT), peran politisi perempuan menjadi krusial dalam menyeimbangkan antara tuntutan elektoral, komitmen partai, dan advokasi isu inklusivitas.

Pada penelitian ini yang saya teliti untuk mengisi kekosongan penelitian tentang representasi politisi Perempuan dalam aspek Proses Representasi Substantif Politisi Perempuan dan bentuk Representasi Substantif Politisi Perempuan Partai Golkar Kota Depok Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok 2024 – 2025.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan dinamika yang telah dijabarkan, penelitian ini difokuskan untuk menggali kedalaman representasi substantif politisi perempuan Partai Golkar di DPRD Kota Depok 2024 – 2025. Rumusan masalah yang disusun bertujuan untuk membedah tidak hanya hasil akhir dari keterwakilan tersebut, tetapi juga proses dan hambatan yang melingkupinya.

1. Bagaimana Proses Representasi Substantif yang dilakukan oleh Politisi Perempuan Partai Golkar Kota Depok 2024 – 2025?
2. Bagaimana Bentuk Representasi Substantif Politisi Perempuan Partai Golkar dalam memperjuangkan kepentingan perempuan di DPRD Golkar Kota Depok 2024 – 2025?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini Sebagai Berikut:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan Proses Representasi Substantif Politisi Perempuan dari Partai Golongan Karya di DPRD Kota Depok 2024 – 2025.
2. Menganalisis bentuk Representasi Substantif Politisi Perempuan (Golkar) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok 2024 – 2025.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari studi ini terbagi menjadi dua aspek yang signifikan: manfaat teoritis (akademis) dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, studi ini berkontribusi pada pengembangan ilmu politik, khususnya dalam kajian representasi politik perempuan di tingkat lokal. Penelitian ini memperkaya literatur mengenai penerapan kebijakan kuota 30% dengan memberikan analisis kritis mengenai perbedaan antara kehadiran fisik (deskriptif) dan kontribusi nyata (substantif). Penggunaan teori Hanna Pitkin dalam konteks kota urban seperti Depok

memberikan sudut pandang baru dalam melihat dinamika gender di luar pusat kekuasaan nasional.

2. Manfaat Praktis

- Bagi Partai Golkar, hasil penelitian ini dapat menjadi instrumen evaluasi internal untuk memperkuat fungsi sayap perempuan (KPPG) dan memastikan bahwa kader perempuan mendapatkan dukungan struktural yang memadai, bukan sekadar dukungan taktis saat pemilihan umum. Bagi DPRD Kota Depok, temuan penelitian ini dapat mendorong terciptanya lingkungan kerja parlemen yang lebih inklusif dan responsif gender.
- Bagi masyarakat dan pemilih, penelitian ini menyediakan informasi yang transparan mengenai sejauh mana wakil rakyat yang mereka pilih benar-benar memperjuangkan kepentingan konstituennya, sehingga dapat meningkatkan kualitas literasi politik warga.

E. Kerangka Berpikir

Kajian mengenai ilmu politik pada era kontemporer tidak lagi terbatas pada diskusi mengenai perebutan kekuasaan secara prosedural atau analisis struktur formal kenegaraan. Seiring dengan kemajuan pemikiran demokrasi, fokus studi telah bergeser ke arah pemahaman yang lebih substantif mengenai bagaimana kebijakan publik mampu merefleksikan aspirasi dari seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok-kelompok yang secara historis terpinggirkan seperti perempuan. Dalam konteks Indonesia, isu representasi perempuan di lembaga legislatif bukan sekadar masalah pemenuhan kuota administratif, melainkan sebuah prasyarat fundamental bagi terciptanya kualitas demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Representasi politik perempuan menjadi indikator penting bagi kematangan sistem politik sebuah bangsa, di mana keberadaan mereka diharapkan mampu mengimbangi dominasi perspektif maskulin yang sering kali buta terhadap kebutuhan spesifik gender.

Laporan ini akan mengupas secara mendalam bagaimana Representasi politisi perempuan dari Partai Golongan Karya (Golkar) berproses di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok, serta bentuk-bentuk representasi yang muncul dalam praktik politik sehari-hari. Dengan menggunakan landasan konseptual dari pemikiran Leo Agustino, teori-teori representasi politik dari Hanna Pitkin dan Anne Phillips dan Teori Gender, analisis ini akan membedah fenomena keterwakilan perempuan di Depok sebagai sebuah dialektika antara kemajuan institusional dan hambatan kultural yang masih persisten. Melalui profil para politisi kunci seperti Hj. Juanah Sarmili, Supriatni, S.Ag., M.M., dan Fanny Fatwati Putri, SH, M.IKom., kita dapat melihat bagaimana variabel-variabel politik, ideologis, dan ekonomi berkelindan dalam membentuk performa politik perempuan di ruang publik.

Variabel penting lainnya dalam kerangka berpikir Agustino (Agustino, 2020) adalah konsep "ketidakterfikirkan" atau *thoughtlessness*, sebuah istilah yang dipinjam dari Martin Heidegger. Konsep ini menjelaskan bagaimana perempuan sering kali tidak memiliki waktu atau "ruang mental" yang cukup untuk memikirkan urusan publik karena disibukkan oleh kegiatan domestik dan karitatif untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di DPRD Kota Depok, variabel ini menjadi krusial untuk menganalisis bagaimana beban ganda yang dipikul oleh politisi perempuan dapat memengaruhi efektivitas mereka dalam merumuskan kebijakan yang pro-gender.

Kerangka berpikir ini juga mengintegrasikan teori Hanna Fenichel Pitkin mengenai dimensi representasi. Representasi tidak hanya dilihat sebagai angka keterwakilan (deskriptif), tetapi juga sebagai tindakan nyata dalam memperjuangkan kepentingan (substansif). Anne Phillips dalam "*The Politics of Presence*" memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa pengalaman hidup unik perempuan adalah modal utama dalam menghasilkan kebijakan yang peka gender.

Representasi politisi perempuan Partai Golkar di DPRD Kota Depok periode 2024-2029 diwujudkan melalui beberapa mekanisme utama, mulai dari proses rekrutmen politik, penempatan dalam struktur Alat Kelengkapan Dewan

(AKD), hingga keterlibatan aktif dalam fungsi-fungsi legislasi dan pengawasan. Kehadiran figur-figur perempuan dari Golkar di Depok menunjukkan bahwa partai ini berusaha untuk mengintegrasikan potensi perempuan dalam struktur pengambilan keputusan tertinggi di tingkat daerah.

Proses representasi dimulai dari panggung kontestasi pemilihan umum. Partai Golkar secara konsisten mematuhi amanat Undang-Undang mengenai kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Namun, lebih dari sekadar pemenuhan administratif, Partai Golkar di Depok berhasil melahirkan politisi perempuan yang memiliki "magnet elektoral" yang kuat. Hal ini terbukti dari keberhasilan tiga srikandi Golkar, yakni Hj. Juanah Sarmili dari Dapil 4 Sukmajaya, Supriatni dari Dapil 1 Pancoran Mas, dan Fanny Fatwati Putri dari Dapil 5 Cilodong-Tapos, yang mampu meraih kursi melalui persaingan ketat.

Keberhasilan mereka sangat dipengaruhi oleh variabel disposisi elit partai yang bersedia menempatkan perempuan pada nomor urut strategis. Data menunjukkan bahwa nomor urut satu memiliki hak istimewa (*privilege*) dalam menarik suara pemilih, dan kemauan Partai Golkar untuk memberikan nomor urut strategis kepada kader perempuan menjadi faktor kunci dalam mewujudkan keterwakilan deskriptif di parlemen.

Bentuk perwujudan yang paling nyata dari kekuasaan politik perempuan di DPRD Depok adalah penempatan mereka dalam posisi-posisi kunci di AKD. Penempatan ini memberikan otoritas formal kepada mereka untuk mengarahkan jalannya rapat, menentukan prioritas pembahasan anggaran, dan melakukan pengawasan terhadap mitra kerja pemerintah.

1. Kepemimpinan di Komisi D: Supriatni, S.Ag., M.M. dipercaya menjabat sebagai Ketua Komisi D yang membidangi isu-isu kesejahteraan rakyat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan.¹ Ini adalah posisi yang sangat strategis karena bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat dan isu-isu yang secara tradisional dianggap sebagai "ranah perempuan".

2. Pimpinan Fraksi: Hj. Juanah Sarmili menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi B Partai Golkar. Posisi ini memberikan akses pada pengambilan keputusan di tingkat fraksi, yang merupakan perpanjangan tangan partai di lembaga legislatif.
3. Keterlibatan di Badan Musyawarah (Bamus): Sebagai anggota Bamus, politisi perempuan Golkar turut menentukan agenda-agenda strategis DPRD Kota Depok selama satu masa sidang.

Bentuk representasi politisi perempuan Partai Golkar di DPRD Kota Depok dapat diklasifikasikan menjadi tiga dimensi utama: representasi substantif dalam kebijakan publik, representasi dalam fungsi pengawasan yang peka gender, dan representasi simbolik dalam penguatan inklusivitas demokrasi.

Bentuk representasi yang paling diharapkan adalah representasi substantif, yaitu sejauh mana ide, pengalaman, dan kepentingan kaum perempuan ditransformasikan ke dalam kebijakan publik yang konkret. Di DPRD Kota Depok, hal ini terwujud dalam beberapa produk legislasi dan program unggulan yang dikawal oleh politisi perempuan Golkar.

1. Perda Ketahanan Keluarga: Politisi perempuan Golkar menjadi aktor kunci dalam pembahasan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Peningkatan Ketahanan Keluarga. Kebijakan ini merupakan manifestasi dari pandangan perempuan bahwa keluarga adalah unit terkecil masyarakat yang harus diperkuat melalui payung hukum untuk mencegah kekerasan, perceraian, dan degradasi moral.
2. Sekolah Pra Nikah (SPN): Supriatni secara konsisten mendukung program SPN sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian di Kota Depok. Bentuk representasi ini menunjukkan pergeseran fokus kebijakan dari sekadar infrastruktur fisik menuju penguatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan sosial.
3. Advokasi Kesehatan Masyarakat: Di bawah kepemimpinan Supriatni, Komisi D memastikan bahwa layanan kesehatan di Puskesmas 24 jam

dan penanganan angka kematian ibu hamil menjadi prioritas dalam rencana kerja pemerintah kota. 10 Mereka juga mengawal implementasi program UHC agar masyarakat yang tidak memiliki BPJS tetap dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis hanya dengan menunjukkan KTP.

Gambar 1. 2 Konsep Penelitian

